



Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang



# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KABUPATEN SABU RAIJUA

MENURUT PENGELUARAN

## 2018-2022

Katalog BPS : 9302003.5320



Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang



# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SABU RAIJUA

MENURUT PENGELUARAN

## 2018-2022

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)  
KABUPATEN SABU RAIJUA MENURUT PENGELUARAN  
2018 – 2022**

**ISSN** : 2598-5019

**Nomor Publikasi** : 53200.2303

**Katalog** : 9302003.5320

**Ukuran Buku** : 21 cm x 29,7 cm

**Jumlah Halaman** : viii + 51 halaman

**Naskah** : BPS Kabupaten Kupang

**Gambar Kulit** : BPS Kabupaten Kupang

**Diterbitkan oleh** : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang  
Jl. Timor Raya Km. 36 - Oelamasi  
*e-mail* : bps5303@bps.go.id  
*website* : saburaijuakab..bps.go.id

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,  
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan  
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang

## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah**

I Made Suartana, SE, M.Si

### **Editor**

Jema Tirana Fananda A.Md.T

### **Penulis**

Paulus Johannes Venn, SE

### **Pengolah Data**

Valentina Andriani E Karwayu, S.Tr.Stat

### **Desain Layout**

BPS Kabupaten Kupang

<https://sabukairakab.bps.go.id>



## Kata Pengantar

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sabu Raijua Menurut Pengeluaran 2018-2022 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kupang bersama dengan Publikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha. Publikasi ini memberikan gambaran makro tentang perekonomian di wilayah Kabupaten Sabu Raijua dari sisi pengeluarannya.

Dukungan dari semua pihak khususnya penyedia data sekunder sangat diharapkan agar kualitas dan keakuratan hasil penghitungan PDRB menurut pengeluaran berikutnya dapat diperbaiki dan semakin ditingkatkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini.

Oelamasi, Maret 2023  
Kepala BPS Kabupaten Kupang

**I Made Suartana, SE, M.Si**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT .....	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah .....	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto .....	17
2.5 Perubahan Inventori .....	19
2.6 Ekspor Impor .....	21
<b>BAB III TINJAUAN EKONOMI</b> .....	<b>23</b>
<b>3.1 Perkembangan PDRB</b> .....	<b>25</b>
<b>3.2 Perkembangan Komponen PDRB</b> .....	<b>29</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN TABEL</b> .....	<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010 .....	8
Tabel 3.1. Perkembangan komponen konsumsi rumah tangga .....	30
Tabel 3.2. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT .....	32
Tabel 3.3. Perkembangan konsumsi akhir pemerintah .....	33
Tabel 3.4. Perkembangan dan Struktur PMTB.....	34
Tabel 3.5. Perkembangan perubahan inventori .....	35
Tabel 3.6. Perkembangan ekspor barang dan jasa .....	36
Tabel 3.7. Perkembangan impor barang dan jasa .....	37

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. PDRB Kabupaten Sabu Raijua, 2018-2022.....	25
Grafik 3.2. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK .....	26
Grafik 3.3. Distribusi PDRB .....	27
Grafik 3.4. Pertumbuhan PDRB ADHK, 2018-2022 .....	29

<https://saburaijuakab.bps.go.id>

<https://saburaijuakab.bps.go.id>

# BAB 1 PENDAHULUAN





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Penjelasan Umum

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi di tingkat regional, sementara di tingkat nasional dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Seperti PDB, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam penghitungan PDRB yaitu (a) pendekatan produksi yang menghitung pendapatan wilayah berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas sektor ekonomi dalam wilayah tersebut (b) pendekatan pendapatan yang menjelaskan tentang struktur/komposisi pendapatan masyarakat di suatu wilayah, serta (c) pendekatan pengeluaran/pengeluaran yang menjelaskan tentang penggunaan akhir dari pendapatan masyarakat. Selama ini, PDB/PDRB yang telah dihitung secara rutin di Indonesia dan juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menggunakan pendekatan produksi menurut lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran.

PDRB sisi sektoral yang dihitung dengan pendekatan produksi lapangan usaha dapat memberikan gambaran struktur ekonomi (harga berlaku) suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi (harga konstan) dan indeks implisit PDRB. Selain itu, dapat pula dihitung PDRB perkapita, sebagai indikator yang menjelaskan tingkat kemakmuran rata-rata orang per orang yang diperoleh dari pembangunan ekonomi atau disebut juga sebagai ukuran produktivitas.

PDRB sisi permintaan atau pengeluaran akhir menjelaskan bagaimana barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh lapangan usaha digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), konsumsi pemerintah dan ditanam sebagai barang modal atau untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Permintaan terhadap barang dan jasa dalam suatu wilayah juga mencakup barang dan jasa yang berasal dari dalam dan luar wilayah (impor) tersebut. Maka, dalam penghitungan nilai PDRB menurut pengeluaran, ekspor barang dan jasa harus dikurangi dengan impor barang dan jasa untuk memperoleh ekspor neto.

Hubungan antara sisi pendapatan dengan sisi pengeluaran akhir berbagai produk barang dan jasa dapat dinyatakan dalam model Keynesian sebagai berikut:

$$Y = C + G + GFCF + \Delta \text{Invent} + (X - M)$$

dimana:

Y	=	PDRB
C	=	Konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT
G	=	Konsumsi Pemerintah
GFCF	=	PMTB

$\Delta$ Invent = Perubahan Inventori

E = Ekspor

M = Impor

(X-M) = Ekspor Neto

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam *The equation above shows the (external transaction)*. Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

## 1.2. Perubahan Tahun dasar PDRB

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan

penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

### **Apa yang Dimaksud SNA 2008?**

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

### **Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?**

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain:

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

### **Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?**

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

### **Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?**

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

#### **Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010**

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- Konsep dan Cakupan:
  - Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  - Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali
  - Penelitian dan pengembangan (*research and Development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran
  - Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang

tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB

- Bank Sentral. Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan
  - Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB
  - Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB
  - Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi: Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode *FISIM (Financial intermediation services indirectly measured/FISIM)*. *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.
  - Valuasi: Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Prices*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.
  - Klasifikasi: Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010

Tabel1.1

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
4. Perubahan Inventori	5. Perubahan Inventori
5. Ekspor	6. Ekspor
6. Impor	7. Impor

# BAB 2 METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA





## Bab 2

### METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

#### 2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

##### i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB Pengeluaran<sup>1</sup>. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

##### ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

##### iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol;
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik;
3. Pakaian dan alas kaki;
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya;
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin;
6. Kesehatan;
7. Angkutan;
8. Komunikasi;

---

<sup>1</sup> Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan;
10. Pendidikan;
11. Penyediaan makan penginapan/hotel;
12. Barang dan jasa lainnya.

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 *COICOP*, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok;
2. Pakaian dan Alas Kaki;
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iii. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

iv. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);

7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan: Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

## **2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga NonProfit**

### **i. Pendahuluan**

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan dibawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### **ii. Konsep dan definisi**

LNPRT merupakan bagian dari lembaga nonprofit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha.

LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### **iii. Cakupan**

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
  - c. Penyusutan
  - d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.
- iv. Sumber Data
- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
  - b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
  - c. Hasil up-dating direktori LNPRT, BPS
  - d. Indeks Harga Konsumen, BPS
- v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan: Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT

### **2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah**

#### **i. Pendahuluan**

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu,

pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar. Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan.

Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda: PK-P atas dasar harga Berlaku = Output – Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market production* + Output Bank Indonesia Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB Umum tanpa Ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB Umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK Umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

#### 2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii. Cakupan

PMTB mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;

3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v. Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data dimasing-masing daerah.

- Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor)= Barang Modal Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:  $PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply:

PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi:

PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga k (t-1) x Indeks Produksi (t)

## 2.5. Perubahan Inventori (PI)

### i. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen. Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif). Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau Belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUKD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjenk Kementan.

v. Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$PI \text{ atas dasar harga Berlaku} = \text{Volume inventori } (t) - \text{Volume inventori } (t-1) \times \text{Harga per unit PI atas dasar harga Konstan} = PI \text{ atas dasar harga Berlaku} / IHPB$$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$PI \text{ atas dasar harga Konstan} = \text{Inventori } (t) \text{ atas dasar harga Berlaku} / IHPB (t) - \text{Inventori } (t-1) \text{ atas dasar harga Berlaku} / IHPB (t-1)$$

$$PI \text{ atas dasar harga Berlaku} = PI \text{ atas dasar harga Konstan} \times IHPB \text{ rata-rata } (t)$$

## 2.6. Ekspor – Impor

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri. Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor impor dari dan ke suatu wilayah.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii. Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

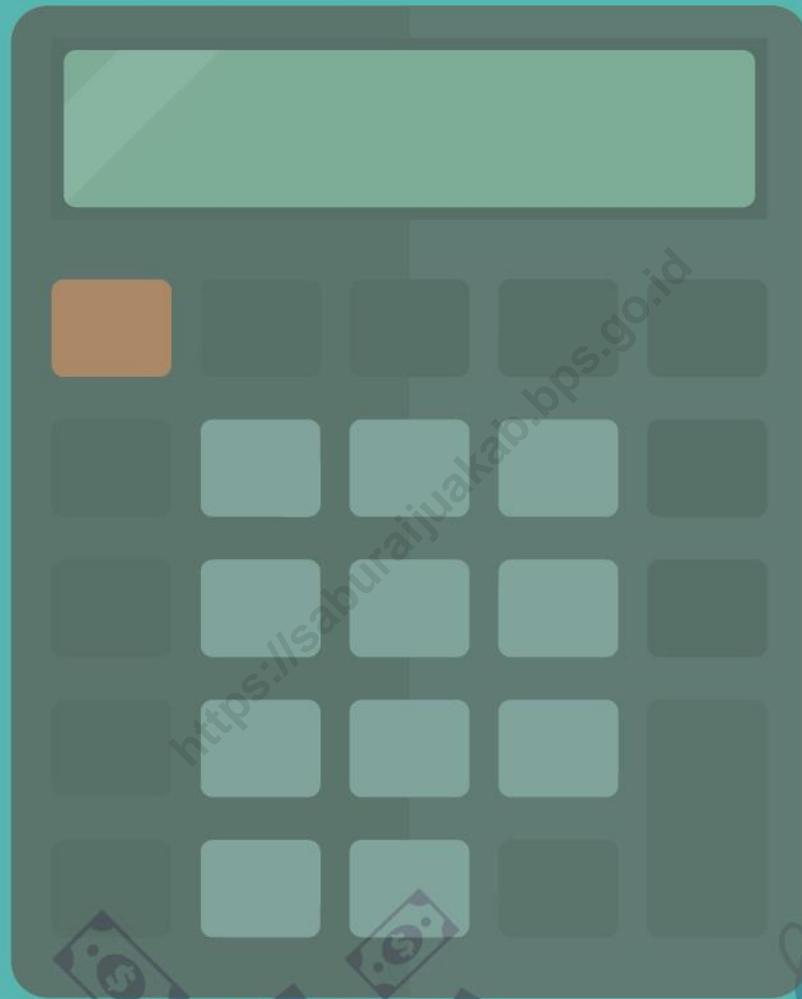
- a. Ekspor keluar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv. Sumber Data

Nilai ekspor-impur wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impordengan menggunakan metoda tidak langsung.

# BAB 3 TINJAUAN PEREKONOMIAN



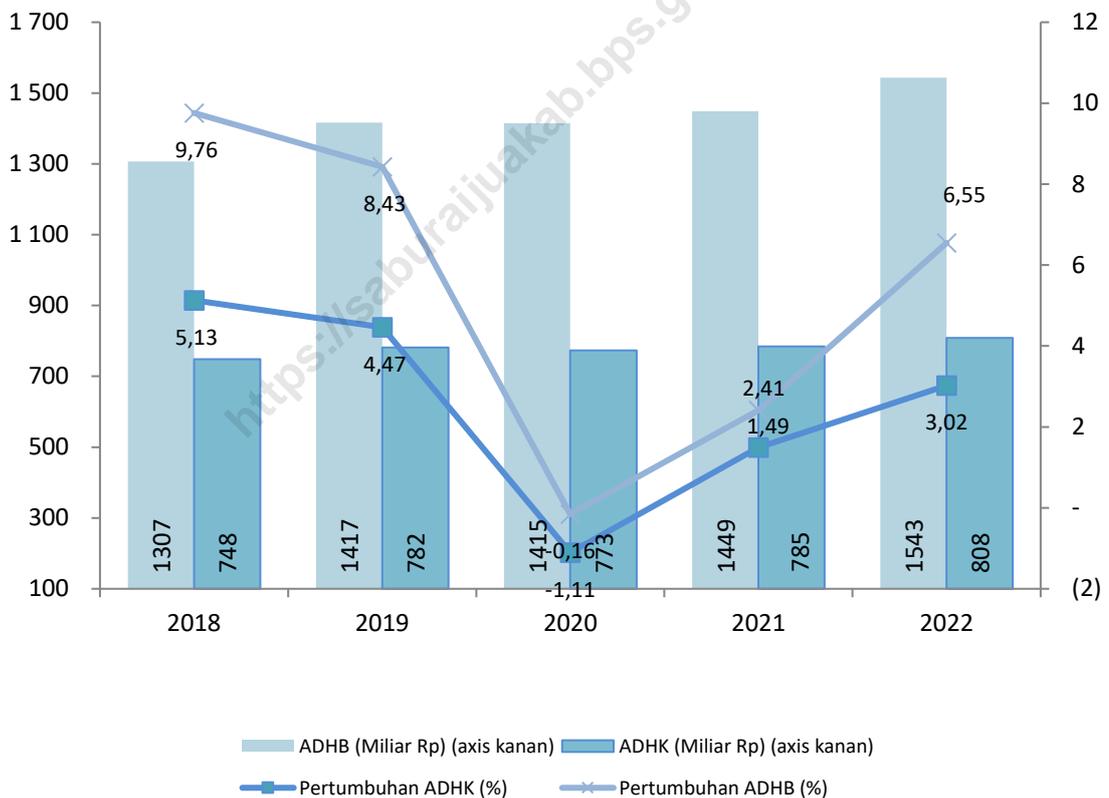


**BAB 3**  
**TINJAUAN PEREKONOMIAN**

**3.1. Perkembangan PDRB**

Tahun 2022 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sabu Raijua diestimasi mencapai 1,54 triliun Rupiah atau meningkat 6,55 persen dibanding tahun 2021. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Sabu Raijua pada saat ini meningkat 236 miliar dari posisi pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 5,40 persen. Namun pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan sejak tahun 2019 dan mencapai titik terendah pertumbuhannya pada tahun 2020 dimana PDRB ADHB menurun 0,16 persen dibanding tahun sebelumnya.

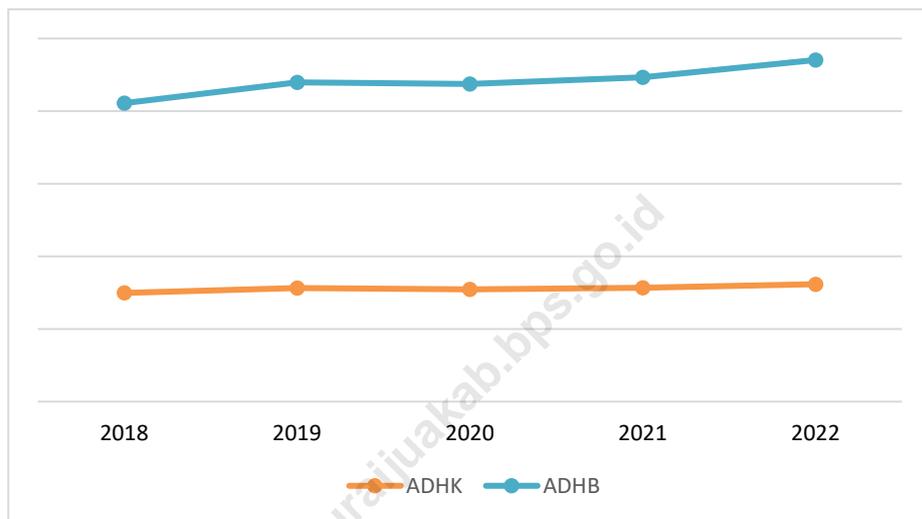
**Grafik 3.1.**  
**PDRB Kabupaten Sabu Raijua, 2018-2022**



Sementara itu, pertumbuhan PDRB ADHK yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3,02 persen pada tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan pemulihan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua setelah mengalami kontraksi sebesar 1,11 persen di tahun 2020. Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua mencapai laju tertinggi sebesar 5,13 persen di tahun 2018 dan posisi terendahnya ialah kontraksi

perekonomian di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dikarenakan fluktuasi tersebut rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun Kabupaten Sabu Raijua selama 5 tahun terakhir ialah 2,60 persen.

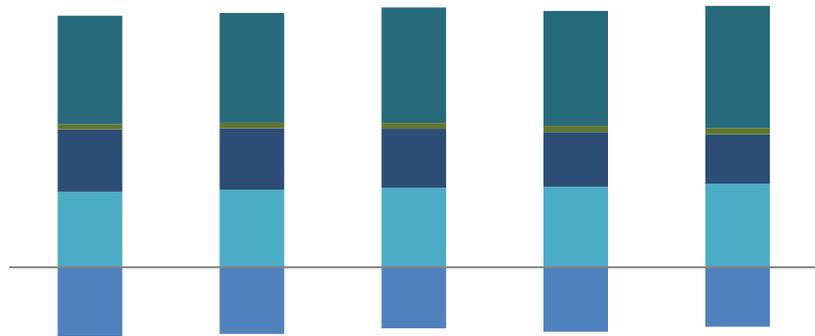
**Grafik 3.2.**  
**Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010**  
**Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sabu Raijua 2018-2022**



Dari grafik di atas, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Pada nilai PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari perubahan harga telah diabaikan, sehingga fluktuasi yang digambarkan lebih mencerminkan perkembangan penggunaan akhir para pelaku ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua.

Berdasarkan data pada Grafik 3.2, dengan membandingkan pertumbuhan PDRB ADHK dan PDRB ADHB terlihat bahwa grafik PDRB ADHB selama 5 tahun terakhir lebih menunjukkan fluktuasi dibandingkan dengan grafik PDRB ADHK yang cenderung landai. Perbedaan fluktuasi yang terlihat pada grafik PDRB ADHB menggambarkan pergerakan harga-harga di kabupaten Sabu Raijua selama periode tersebut..

**Grafik 3.3.**  
**Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, 2018-2022 (persen)**



	2018	2019	2020	2021	2022
■ Konsumsi Rumah Tangga	59,43	58,49	58,15	59,88	60,46
■ Konsumsi LNPRT	2,96	3,01	2,98	3,26	3,23
■ Konsumsi Pemerintah	34,25	32,70	29,69	28,51	24,58
■ PMTB	41,42	41,26	39,94	42,01	41,29
■ Perubahan Inventori	0	0,00	0,00	0,00	0,00
■ Net-Ekspor	-38,05	-35,47	-30,75	-33,66	-29,56

Hingga tahun 2022, struktur PDRB menurut pengeluaran yang juga menggambarkan struktur perekonomian, belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Konsumsi rumah tangga masih merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua, meskipun trennya cenderung menurun tetapi masih mendominasi dalam pembentukan PDRB ADHB yakni mencapai 60,46 persen di tahun 2022. Kecenderungan penurunan kontribusi konsumsi rumah tangga tersebut tidak semata-mata disebabkan berkurangnya nilai absolut konsumsi rumah tangga, melainkan juga disebabkan oleh dinamika kontribusi dari komponen lainnya.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan merupakan kontributor tertinggi kedua pada pembentukan PDRB Kabupaten Sabu Raijua dengan peran pada tahun 2022 sekitar 41 persen, dimana angka ini menurun dibanding tahun 2021. Hingga tahun 2022, sebagian besar PMTB di Kabupaten Sabu Raijua berasal dari pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berupa pembangunan infrastruktur gedung, jalan dan lainnya untuk kepentingan masyarakat umum di wilayah Kabupaten Sabu Raijua ditambah dengan pembangunan fisik lainnya oleh masyarakat sendiri.

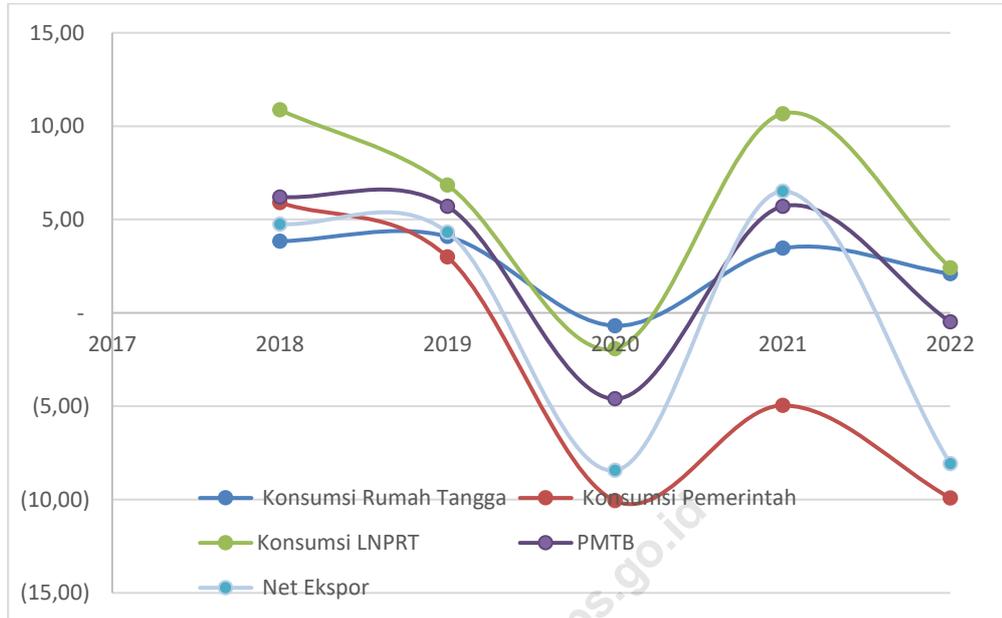
Di urutan ketiga, distribusi pengeluaran untuk komponen konsumsi pemerintahan tahun 2022 justru mengalami penurunan menjadi 24,58 persen. Komponen konsumsi pemerintah terdiri atas belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja modal dan

belanja pegawai dikurangi pendapatan lain-lain PAD yang sah. Beberapa jenis belanja tersebut khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, sebagian besar masih diperoleh dari luar wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini disebabkan keterbatasan kapasitas usaha khususnya sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi serta jasa-jasa di kabupaten ini dalam menyediakan berbagai kebutuhan barang dan jasa pemerintah tersebut sehingga meskipun di atas kertas peranan belanja pemerintah terlihat cukup nyata terhadap perekonomian Kabupaten Sabu Raijua, tetapi faktanya belum sepenuhnya terdistribusi pada kegiatan perekonomian di kabupaten ini.

Sementara itu, distribusi pengeluaran untuk konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) hanya berkisar antara 2 hingga 3 persen. Sebagian besar LNPR yang terdapat di Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari lembaga keagamaan khususnya perkumpulan jemaat gereja yang masing-masing merupakan lembaga keagamaan mandiri dan memberi dampak pada perekonomian.

Hingga tahun 2022, Kabupaten Sabu Raijua masih merupakan net importir sehingga distribusi PDRB dari ekspor neto juga masih bernilai negatif. Tahun 2022 sekitar 11 persen dari total nilai PDRB kabupaten ini ditujukan untuk memenuhi keperluan ekspor sedangkan porsi nilai pengeluaran barang dan jasa asal impor sebesar 40,94 persen. Barang yang diekspor ke luar wilayah Kabupaten Sabu Raijua sebagian besar terdiri dari hasil sumber daya alam berupa tanaman pangan, hewan ternak, hasil laut dan bahan galian. Sementara, ekspor jasa diantaranya terdiri dari tenaga kerja yang merupakan residen/penduduk Kabupaten Sabu Raijua yang bekerja di luar wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Sementara itu, sebagian besar barang-barang yang masuk dan diperdagangkan ke wilayah Kabupaten Sabu Raijua berupa barang-barang keperluan rumah tangga, bahan makanan, makanan dan minuman jadi, bahan bangunan, keperluan pertanian dan lain sebagainya.

**Grafik 3.4.**  
**Pertumbuhan Komponen PDRB atas dasar harga Konstan 2010, 2018-2022**



Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Secara umum pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi sebagian besar komponen PDRB Kabupaten Sabu Raijua yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi sudah mulai bangkit dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi tahun 2022.

### 3.2. Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan Perubahan Inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Sabu Raijua untuk periode 2018 – 2022.

### 3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Sabu Raijua, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

**Tabel 3.1. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Juta Rupiah)	776467.0058	828672.9352	822473.9319	867484.4370	933228.4893
b. ADHK (Juta Rupiah)	573952.7641	597443.2005	593335.7032	613873.8012	626737.7624
Proporsi terhadap PDRB	59,43	58,49	58,15	59,88	60,46
Rata-rata konsumsi per-Kapita					
a. ADHB (Rupiah)	8 224 763	8,566,688	9,252,507	9,549,901	10,057,208
b. ADHK (Rupiah)	6 079 622	6,176,272	6,674,793	6,757,970	6,754,221
Jumlah Penduduk (Proyeksi)	94 406	96 732	88 892	90 837*	92792*

\*) data jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 dan proyeksi Sensus penduduk 2020

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018 dan 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada

gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Perbedaan sedikit terjadi di tahun 2020 dan 2021, dimana dasar data penduduk yang digunakan berbeda dengan data yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Hingga tahun 2019 data penduduk yang digunakan merupakan hasil proyeksi data sensus penduduk 2010, sedangkan sejak tahun 2020 data dasar yang digunakan ialah data sensus penduduk 2020.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi akhir rumah tangga sebesar 0,68 persen dibandingkan tahun 2019. Sedangkan di tahun 2022 konsumsi akhir rumah tangga kembali meningkat sebesar 2,09 persen. Selama periode 2018-2022, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berkisar antara 58 hingga 60 persen. Posisi tertinggi adalah pada tahun 2022 dimana mencapai 60 persen, sementara terendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 58,15 persen. Proporsi komponen ini terhadap pembentukan PDRB cenderung semakin menurun setiap tahunnya.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi rumah tangga per kapita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Karena perbedaan data dasar, konsumsi perkapita tahun 2020 dan tahun sebelumnya sulit untuk dibandingkan, maka dalam penjelasan ini analisisnya akan dipisahkan. Pada tahun 2020, rata-rata penduduk di Kabupaten Sabu Raijua menghabiskan dana sekitar Rp 9.130.213 setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi Rp 10.057.208 per penduduk per tahun pada tahun 2022.

### **3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT**

Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

**Tabel 3.2. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Juta Rupiah)	38 689,46	42 574,40	42 119,16	47 263,26	49 787,01
b. ADHK (Juta Rupiah)	30 724,19	32 826,40	32 196,26	35 630,91	36 493,03
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,96	3,01	2,98	3,26	3,23
Pertumbuhan (ADHK 2010)	10,87	6,84	-1,92	10,67	2,42

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan baik ADHB maupun ADHK. Namun di tahun 2020 konsumsi LNPRT menurun 1,07 persen dari nilainya pada tahun 2019 berdasarkan harga berlaku dan menurun 1,92 persen berdasarkan harga konstan. Di tahun 2022 konsumsi akhir LNPRT kembali meningkat sebesar 5,34 persen berdasarkan harga berlaku, dan 2,42 persen berdasarkan harga konstan.

### 3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah:

- Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah.
- Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga).
- Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri:

- Nonrivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut.

- b. *Nonexcludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

**Tabel 3.3. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Juta Rupiah)	447 484,83	463 336,61	419 943,68	412 969,39	379 384,37
b. ADHK (Juta Rupiah)	184 975,75	190 520,11	171 346,39	162 845,61	146 703,33
Proporsi terhadap PDRB	34,25	32,70	29,69	28,51	24,58
Konsumsi Pemerintah per-kapita					
c. ADHB (Rupiah)	4 740 004	4 789 900	4 724 201	4 546 269	4 088 546
d. ADHK (Rupiah)	1 959 364	1 969 567	1 927 579	1 792 723	1 580 991
Jumlah Penduduk (Proyeksi)	94 406	96 732	88 892	90 837	92 792

Secara total, Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2018, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB adalah sebesar 447 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 463 miliar rupiah (2019), 419 miliar rupiah (2020), 412 miliar rupiah (2021), dan 379 miliar rupiah (2022). Sejak tahun 2020 nilai konsumsi akhir pemerintah mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2020 nilainya turun sebesar 10,06 persen dibandingkan tahun 2019 dan pada tahun 2021 kembali menurun sebesar 4,96 persen dari posisi pada tahun 2021. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah pada tahun 2022 kembali menurun sebesar 9,91 persen dibandingkan tahun 2021.

Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB berkisar di angka 28 hingga lebih dari 34 persen. Angka ini menjadikan komponen pengeluaran akhir pemerintah sebagai salah satu komponen yang memiliki andil besar dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Proporsi paling tinggi yakni terjadi pada tahun 2018 sebesar 34,25 persen, sementara terendah yakni pada tahun 2022 sebesar 24,58 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2019, konsumsi pemerintah per kapita ADHB ialah sebesar 4,8 juta rupiah, nilai tersebut kembali menurun pada tahun 2022 yakni sebesar 4,09 juta rupiah perkapita.

### 3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>2</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 3.4. Perkembangan dan Struktur PMTB, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total PMTB</b>					
a. ADHB (Juta Rupiah)	541 142,80	584 597,65	564 904,56	608 592,47	637 352,55
b. ADHK (Juta Rupiah)	295 495,46	312 348,27	297 968,64	314 962,12	313 437,59
Proporsi terhadap PDRB	41,42	41,26	39,94	42,01	41,26
<b>Struktur PMTB (ADHB)</b>					
a. Bangunan (Juta Rupiah)	326 453,26	354 250,44	325 909,90	356 844,83	371 532,72
b. Non-Bangunan (Juta Rupiah)	214 689,54	230 347,20	238 994,66	251 747,64	265 819,83
Total PMTB (pertumbuhan)	6,20	5,70	-4,60	5,70	-0,48

<sup>2</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data pada table di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2018–2022 cenderung menurun, dengan titik terendahnya ialah kontraksi pada tahun 2022 sebesar 0,48 persen. Sebelum mengalami kontraksi tersebut, konsumsi terkait PMTB sebesar 5,70 persen di tahun 2021. Proporsi konsumsi PMTB dalam pembentukan PDRB kabupaten Sabu Raijua selama 5 tahun terakhir berkisar antara 39 hingga 42 persen. Nilai kontribusi tertinggi ialah pada tahun 2021 yakni sebesar 42 persen dan nilai terendahnya ialah pada tahun 2020 yakni sebesar 39,94 persen dari total PDRB.

### 3.2.5 Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan Perubahan Inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen ekspor neto antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 3.5. Perkembangan Perubahan Inventori, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Inventori					
a. ADHB (Juta Rupiah)	0,05	0,07	0,09	0,10	0,10
b. ADHK (Juta Rupiah)	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05
Total Pertumbuhan	62,62	25,89	17,25	2,13	5,55

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, Perubahan Inventori baru dapat dianalisis dari sisi pertumbuhannya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya. Pada tahun 2018, Perubahan Inventori tumbuh sebesar 62,62 persen dari tahun 2021, yang kemudian tumbuh 25,89 persen pada tahun 2019, di tahun 2020 nilainya kembali tumbuh sebesar 17,25 persen dari posisi di tahun 2018, dan ditahun 2022 tumbuh sebesar 5,55 persen. Nilai pertumbuhan terendahnya ialah pada tahun 2021 yakni sebesar 2,13 persen.

### 3.2.6 Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Sabu Raijua, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 3.6. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor					
a. ADHB (Juta Rupiah)	218 443,82	230 106,36	179 972,97	154 744,11	175 723,81
b. ADHK (Juta Rupiah)	118 504,68	122 133,70	94 071,41	79 304,50	86 595,26
Proporsi terhadap PDRB	16,72	16,24	12,72	10,68	11,38
Pertumbuhan	16,34	3,06	-22,98	-15,70	9,19

Secara total, dalam kurun waktu 2018-2022, nilai ekspor barang dan jasa cukup menunjukkan fluktuasi. Namun sejak tahun 2019 nilai riil ekspor cenderung menurun hingga pada tahun 2021. Pada tahun 2018, nilai ekspor barang dan jasa ADHB sebesar 218 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar 230 miliar rupiah pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020, nilai ekspor barang dan jasa turun menjadi sebesar 179 miliar rupiah kemudian turun lagi menjadi 154 miliar rupiah di tahun 2021. Sementara di tahun 2022 nilai ekspor barang dan jasa kembali meningkat menjadi 175 miliar rupiah.

Sejalan dengan nilai ekspor ADHB, nilai ekspor barang dan jasa ADHK 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung berfluktuasi dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 118 miliar rupiah (2018), 122 miliar rupiah (2019), 94 miliar rupiah (2020), 79 miliar rupiah (2021), dan 86 miliar rupiah (2022). Proporsi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB tertinggi pada tahun 2018 yakni sebesar 16,72 persen, sementara terendah di tahun 2021 yang hanya berkisar pada angka 10,68 persen.

### 3.2.7 Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Sabu Raijua. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Sabu Raijua di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Sabu Raijua terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik provinsi lain, maupun luar negeri. Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Sabu Raijua cenderung meningkat (baik ADHB maupun ADHK 2010) pada kurun tahun 2018 s.d 2022.

**Tabel 3.7. Perkembangan Impor Barang dan Jasa, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Impor					
a. ADHB (Juta Rupiah)	715 618,93	732 553,98	614 899,02	642 424,46	631 981,49
b. ADHK (Juta Rupiah)	455 243,33	473 441,40	415 740,53	421 924,93	401 555,67
Proporsi terhadap PDRB	54,77	51,71	43,47	44,35	40,94
Pertumbuhan	7,54	4,00	-12,19	1,49	-4,83

Pada tahun 2018, nilai impor barang dan jasa ADHB mencapai 715 miliar rupiah, kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 732 miliar rupiah. Nilai impor pada tahun 2020 turun menjadi 614 miliar dan meningkat menjadi 642 miliar rupiah pada tahun 2021, pada tahun 2022 nilai tersebut turun menjadi 631 miliar rupiah.

Dilihat dari proporsinya, impor barang dan jasa Kabupaten Sabu Raijua cenderung berfluktuatif. Kontribusi tertinggi komponen ini ialah pada tahun 2018 yakni sebesar 54,77 persen dan nilai kontribusi terendahnya ialah 40,94 persen di tahun 2022.

# PENUTUP



<https://saburaijuakab.bps.go.id>





## PENUTUP

PDRB menurut pengeluaran tahun 2018 s.d 2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Sabu Raijua pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.

Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.

ata dapat disajikan dalam bentuk *series* data dari tahun 2017 s.d 2021, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua terhadap ekonomi luar daerah.

<https://saburaijuakab.bps.go.id>

# LAMPIRAN

<https://saburajjualkab.pbe.go.id>



**Tabel 1**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran**  
**Atas Dasar Harga Berlaku, 2018-2022 (Juta Rupiah)**

No.	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Konsumsi Rumah Tangga	776 467,01	828 672,94	822 473,93	867 484,44	933 228,49
2.	Konsumsi LNPRT	38 689,46	42 574,40	42 119,16	49 787,01	49 787,01
3.	Konsumsi Pemerintah	447 484,83	463 336,61	419 943,68	379 384,37	379 384,37
4.	PMTB	541 142,80	584 597,65	564 904,56	637 352,55	637 352,55
5.	Perubahan Inventori	0,05	0,07	0,09	0,10	0,10
6.	Ekspor	218 443,82	230 106,36	179 972,97	154 744,11	175 723,81
7.	<u>Dikurangi</u> Impor	715 618,93	732 553,98	614 899,02	642 424,46	631 981,49
	<b>PDRB</b>	<b>1 306 609,03</b>	<b>1 416 734,04</b>	<b>1 414 515,37</b>	<b>1 448 629,29</b>	<b>1 543 494,85</b>

\*) Angka Sementara \*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 2**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2018-2022 (Juta Rupiah)**

No.	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<b>Konsumsi Rumah Tangga</b>	573 952,76	597 443,20	593 335,70	613 873,80	626 737,76
2.	<b>Konsumsi LNPRT</b>	30 724,19	32 826,40	32 196,26	35 630,91	36 493,03
3.	<b>Konsumsi Pemerintah</b>	184 975,75	190 520,11	171 346,39	162 845,61	146 703,33
4.	<b>PMTB</b>	295 495,46	312 348,27	297 968,64	314 962,12	313 437,59
5.	<b>Perubahan Inventori</b>	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05
6.	<b>Ekspor</b>	118 504,68	122 133,70	94 071,41	79 304,50	86 595,26
7.	<b>Dikurangi Impor</b>	455 243,33	473 441,40	415 740,53	421 924,93	401 555,67
	<b>PDRB</b>	<b>748 409,54</b>	<b>781 830,32</b>	<b>773 177,92</b>	<b>784 692,06</b>	<b>808 411,36</b>

\*) Angka Sementara \*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 3**  
**Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran**  
**Atas Dasar Harga Berlaku 2018-2022 (persen)**

No.	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Konsumsi Rumah Tangga	59,43	58,49	58,15	59,88	60,46
2.	Konsumsi LNPRT	2,96	3,01	2,98	3,26	3,23
3.	Konsumsi Pemerintah	34,25	32,70	29,69	28,51	24,58
4.	PMTB	41,42	41,26	39,94	42,01	41,29
5.	Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ekspor	16,72	16,24	12,72	10,68	11,38
7.	<u>Dikurangi</u> Impor	54,77	51,71	43,47	44,35	40,94
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*) Angka Sementara \*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 4**  
**Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2018-2022 (persen)**

No.	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Konsumsi Rumah Tangga	76,69	76,42	76,74	78,23	77,53
2.	Konsumsi LNPRT	4,11	4,20	4,16	4,54	4,51
3.	Konsumsi Pemerintah	24,72	24,37	22,16	20,75	18,15
4.	PMTB	39,48	39,95	38,54	40,14	38,77
5.	Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ekspor	15,83	15,62	12,17	10,11	10,71
7.	<u>Dikurangi</u> Impor	60,83	60,56	53,77	53,77	49,67
	<b>PDRB</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

\*) Angka Sementara \*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 5**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran**  
**Atas Dasar Harga Berlaku, 2018-2022 (persen)**

No.	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Konsumsi Rumah Tangga	6,08	6,72	-0,75	5,47	7,58
2.	Konsumsi LNPRT	14,37	10,04	-1,07	12,21	5,34
3.	Konsumsi Pemerintah	13,84	3,54	-9,37	-1,66	-8,13
4.	PMTB	9,09	8,03	-3,37	7,73	4,73
5.	Perubahan Inventori	71,33	34,39	21,79	13,34	5,87
6.	Ekspor	20,43	5,34	-2,79	-14,02	13,56
7.	<u>Dikurangi</u> Impor	10,79	2,37	-16,06	4,48	-1,63
	<b>PDRB</b>	<b>9,76</b>	<b>8,43</b>	<b>-0,16</b>	<b>2,41</b>	<b>6,55</b>

\*) Angka Sementara \*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 6**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2018-2022 (persen)**

No.	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Konsumsi Rumah Tangga	3,83	4,09	-0,69	3,46	2,10
2.	Konsumsi LNPRT	10,87	6,84	-1,92	10,67	2,42
3.	Konsumsi Pemerintah	5,91	3,00	-10,06	-4,96	-9,91
4.	PMTB	6,20	5,70	-4,60	5,70	-0,48
5.	Perubahan Inventori	62,62	25,89	17,25	2,13	5,55
6.	Ekspor	16,34	3,06	-22,98	-15,70	9,19
7.	<u>Dikurangi</u> Impor	7,54	4,00	-12,19	1,49	-4,83
	<b>PDRB</b>	<b>5,13</b>	<b>4,47</b>	<b>-1,11</b>	<b>1,49</b>	<b>3,02</b>

\*) Angka Sementara \*\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel 7**  
**Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran, 2018-2022**

No.	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Konsumsi Rumah Tangga	135,28	138,70	138,62	141,31	148,90
2.	Konsumsi LNPRT	125,93	129,70	130,82	132,65	136,43
3.	Konsumsi Pemerintah	241,92	243,20	245,08	253,60	258,61
4.	PMTB	183,13	187,16	189,59	193,23	203,34
5.	Perubahan Inventori	184,19	196,63	204,24	226,65	227,33
6.	Ekspor	184,33	188,41	191,32	195,13	202,93
7.	<u>Dikurangi</u> Impor	157,19	154,73	147,90	152,26	157,38
	<b>PDRB</b>	<b>174,58</b>	<b>181,21</b>	<b>182,95</b>	<b>184,61</b>	<b>190,93</b>

\*) Angka Sementara \*\*) Angka Sangat Sementara